

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Metode Penelitian	12
1.5.1 Tipe Penelitian	12
1.5.2 Pendekatan Penelitian	13
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	14
1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum	15
1.5.5 Analisis Bahan	16
1.5.6 Pertanggungjawaban Sistematika	16
BAB II	19
KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	19
2.1 Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	19
2.1.1 Kewenangan Pemerintah Pusat	23
2.1.2 Kewenangan Pemerintah Provinsi	27
2.1.3 Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota	31
2.2 Argumentasi Yuridis Kewenangan Pemindahan Ibu Kota Negara	34
2.2.1 Pemindahan Ibu Kota Negara berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	34
2.2.2 Perbandingan Kewenangan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara dan Kalimantan sebagai Calon Ibu Kota Negara	37
2.2.3 Pemindahan Ibu Kota di Negara Lain (Malaysia)	40
BAB III	45
BENTUK PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP OLEH PEMERINTAH TERKAIT PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA	45

3.1 Alasan Pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur	45
3.1.1 Implikasi Hukum Pemindahan Ibu Kota Negara	47
3.1.2 Keadaan Lingkungan di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.....	52
3.1.3 Dampak Lingkungan adanya Pemindahan Ibu Kota Negara	55
3.2 Implementasi Perlindungan Lingkungan Hidup terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara oleh Pemerintah	58
3.2.1 Perkembangan Hukum Lingkungan di Indonesia	62
3.2.2 Perlindungan Preventif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	64
3.2.3 Perlindungan Represif berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009	67
BAB IV	72
PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran	73

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur.

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.